

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR 45 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
 MENENGAH DESA DAN RENCANA  
 KERJA PEMERINTAH DESA

I. FORMAT PENYUSUNAN RPJM Desa

A. FORMAT KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA  
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA



KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN PERBEKEL.....

NOMOR :        /        / KEP /20...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
 DESA TAHUN .....

PERBEKEL.....,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan  
 penyusunan Rencana Pembangunan Desa .....  
 Tahun ....., perlu membentuk Tim;  
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
 dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel  
 .....tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana  
 Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
 Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah  
 Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  
 Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia  
 Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Nomor 1655) ;  
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
 Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun  
 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik  
 Indonesia Nomor 4286);  
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  
 Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  
 Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,  
 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);  
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 );
16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 692).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun ..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun .....
  - b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun .....kepada Perbekel;
  - c. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun .....; kepada masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....  
PERBEKEL.....

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Camat .....
2. Ketua BPD Desa .....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL.....  
 NOMOR ... ..TAHUN .....  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
 TAHUN .....

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
 MENENGAH DESA TAHUN .....

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		PERBEKEL	PEMBINA
2.		SEKRETARIS DESA	KETUA
3.		KETUA LPM	SEKRETARIS
4.		PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5.		LEMBAGA KEMASYA RAKATAN DESA	ANGGOTA
6.		KPMD	ANGGOTA
7.		LEMBAGA ADAT	ANGGOTA
8.		.....	ANGGOTA
9.		.....	ANGGOTA
..		.....	ANGGOTA

PERBEKEL.....

B. FORMAT DATA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG  
 MASUK KE DESA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN  
 KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

No.	Program/Kegiatan	SKPD Pengelola	Lokasi Kegiatan (Banjar/RT)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)

Mengetahui :  
 Perbekel.....

Desa....., .....  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

## D. FORMAT DATA DESA

## D.1.FORMAT SUMBER DAYA MANUSIA

## SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	JUMLAH		SATUAN
		L	P	
	CONTOH			
1	Penduduk dan keluarga			
	a.Jumlah penduduk			Orang
	d.Jumlah keluarga			Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk			
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan			
	b. Pertambangan dan penggalian			
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)			
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan			
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi			
	f. Jasa ( Tukang cukur, Salon, Tukang Batu , Dokter, Bidan, Guru, dst )			
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)			
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan			
	a. Lulusan S-3 keatas			
	b. Lulusan S-2 keatas			
	c. Lulusan S-1 keatas			
	d. Lulusan SLA			
	e. Lulusan SMP			
	f. Lulusan SD			
	g. Tidak tamat SD/ tidak sekolah			
4.	Data Kemiskinan			
	Jumlah KK Non Miskin			
	Jumlah KK Miskin			
	Jumlah KK H			
5.	Cacat Mental dan Fisik			
	a. Cacat Fisik			
	Tuna Rungu			
	Tuna Wicara			
	Lumpuh			
	Sumbing			
	Invalid lainnya			
	b. Cacat Mental			
	Idiot			
	Gila			
	Stres			
6.	Jumlah Tenaga Kerja Usia Produktif			

Desa, .....

Mengetahui :  
Perbekel.....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

## Keterangan :

1. Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa
2. Data Kependudukan Catatan Sipil, data Pendidikan dll yang relevan
3. D = SDA dalam Desa
4. K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/wilayah antar Desa

## D.2. FORMAT DATA SUMBER DAYA ALAM

## SUMBER DAYA ALAM

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

NO	URAIAN SUMBER DAYA ALAM	JUMLAH	SATUAN
	CONTOH		
1	Material Batu kali		
2	Pasir Urug		
3	Lahan Tegalan		
4	Lahan Persawahan		
5	Lahan Hutan		
6	Sungai		
7	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Lada, Kopi, Panili		
8	Air Terjun		

Mengetahui :  
Perbekel.....

Desa, .....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

## Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa  
Data lain-lain yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

## D.3. FORMAT SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

## SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
	CONTOH		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
	.....		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
	.....		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
	1) Sumur gali		
	2) Sumur Pompa		
	3) Mata Air		
	4) Hidran Umum		
	5) PAH		
	6) Embung		
	7) Air Bersih Perpipaan		
4.	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
	.....		
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
	.....		
6.	Aset berupa modal yang di miliki desa		
	a. Total aset produktif		
	b.Total pinjaman aset desa di syarakat		
	.....		
7.	Aset Irigasi		
	a. Irigasi Primer		
	b. Irigasi Sekunder		
	c. Irigasi Tersier		
	d. Pintu Sadap		
	e. Pintu Bagi		

Mengetahui :  
Perbekel .....Desa, .....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

## D.4. FORMAT DATA KETIMPANGAN GENDER

## DATA KETIMPANGAN GENDER

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PEMANFAAT		KETERANGAN
			L	P	
1.					

Mengetahui :  
 Perbekel.....

Desa, .....  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

---



---

## D.5. FORMAT DATA KEMISKINAN

## DATA KEMISKINAN

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

NO	LOKASI BANJAR DINAS/RT	JML KK	JML PENDUDUK		JML PDDK MISKIN		KET
			L	P	L	P	
1.	BD. ....						
	RT 1						
	RT 2						
	.....						
2.	BD .....						

Mengetahui :  
 Perbekel.....

Desa, .....  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

---



---



## D.6. FORMAT DATA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

## DATA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

NO	NAMA KORBAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT	JENIS KEKERASAN	PELAKU
		L	P			
1.					FISIK	AYAH,IBU
					.....	.....

Mengetahui :  
 Perbekel.....

Desa, .....  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

## D.7. FORMAT DATA MASYARAKAT YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

## DATA MASYARAKAT YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	UMUR	JENIS CACAT	KET
		L	P				
1.					10 Th	Tuna rungu	
2.					.....	Mental	
...						.....	

Mengetahui :  
 Perbekel.....

Desa, .....  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

## D.8. FORMAT DATA SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

## SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	Jumlah Penduduk Buta		
	Jumlah penduduk Usia dini yang belum terlayani pendidikan		
	Jumlah penduduk Usia dini yang sudah terlayani pendidikan		
	Jumlah penduduk tidak tamat SD		
	Jumlah penduduk tamat SD		
	Jumlah penduduk tidak tamat SMP		
	Jumlah penduduk tamat SMP		
	Jumlah penduduk tamat D 1		
	Jumlah penduduk tamat D 2		
	Jumlah penduduk tamat D 3		
	Jumlah penduduk tamat S 1		
	Jumlah penduduk tamat S 2		
	Jumlah penduduk tamat S 3		
2	Kesehatan Masyarakat		
	Kematian bayi		
	Jumlah Bayi Lahir Tahun ini		
	Jumlah Bayi Mati Tahun ini		
	Kejadian Luar Biasa		
	Muntaber		
	Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini		
	Jumlah yang meninggal		
	Demam berdarah		
	Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini		
	Jumlah yang meninggal		
	Kematian Ibu Melahirkan		
	Jumlah Ibu melahirkan pada tahun ini		
	Jumlah Ibu melahirkan mati tahun ini		
	Cakupan Imunisasi		
	Imunisasi polio-3		
	Imunisasi DPT 1		
	Imunisasi Cacar		
	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan air bersih		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur gali		
	Jumlah Rumah Tangga pelanggan PAM		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan air PAH		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur pompa		

1	2	3	4
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan perpipaan air		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan hidaran umum		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan Embung		
	Total jumlah rumah tangga pengguna air bersih		
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
	Kebiasaan buang air besar		
	Jumlah rumah tangga yang buang air besar di WC		
	Jumlah rumah tangga yang buang air besar di Sungai, parit, pekarangan		
	Gizi Balita		
	Jumlah Balita		
	Jumlah Balita bergizi buruk		
	Jenis dan Kelompok Kesenian yang ada di desa		
	.....		
	Dst		
	Rumah Penduduk		
	.....		
	Rumah Tidak Layak Huni		
	Tidak punya Rumah		

Desa, .....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui :  
Perbekel.....

#### D.9. FORMAT DATA KONDISI INFRASTRUKTUR

##### DATA KONDISI INFRASTRUKTUR

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

NO	JENIS BANGUNAN	KONDISI			TH PEMBANGUNAN	SUMBER DANA
		PARAH	RUSAK SEDANG	BAIK		
1.	Jembatan		√		2007	
2.	.....					

Desa, .....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui :  
Perbekel.....

## D.10. FORMAT DATA ASET DESA

## DATA ASET DESA

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

NO	JENIS ASET	LOKASI	JUMLAH	PENGGUNAAN
1.	Tanah Kas Desa			
2.	.....			

Mengetahui : \_\_\_\_\_ Desa, .....  
 Perbekel..... Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

## E.FORMAT PENGGALIAN GAGASAN

## E.1. KAJIAN SKETSA DESA

## KAJIAN SKETSA DESA


BANJAR DINAS : .....  
 DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

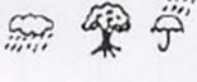
NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH		
1.	Administrasi Desa tidak tertib	1.SDM rendah 2.Tidak paham	1. Perangkat Desa 2. Anggaran tersedia 3. Kader Pembudayaan Masyarakat
2.	Dst.....		
II	BIDANG PEMBANGUNAN DESA		
1.	Jalan Rt 1 Rusak	1. Pada musim peng hujan jalan kemasukan air dari saluran air	1. Tenaga 2. Batu 3. Pasir
	Dst.....		

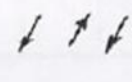


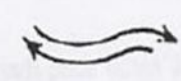
Contoh Simbol-simbol atau Tanda-tanda dalam Kalender Musim

Contoh simbol






Musim Kemarau → 

Musim Hujan → 

Musim Pancaroba → 

Musim Angin → 

Contoh nilai kritis :

- Masalah sangat kritis → 
- Masalah kritis →  atau 
- Masalah cukup kritis → 
- Masalah kurang kritis → 

Ditentukan lebih lanjut oleh peserta musdus

contoh format kalender musim.

Masalah/ Keadaan/ Kegiatan	Hujan				Pancaroba				Kemarau			
	Sep	Okt	Nov	Des	Jan.	Peb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

E.3.FORMAT KAJIAN DIAGRAM KELEMBAGAAN

KAJIAN DIAGRAM KELEMBAGAAN

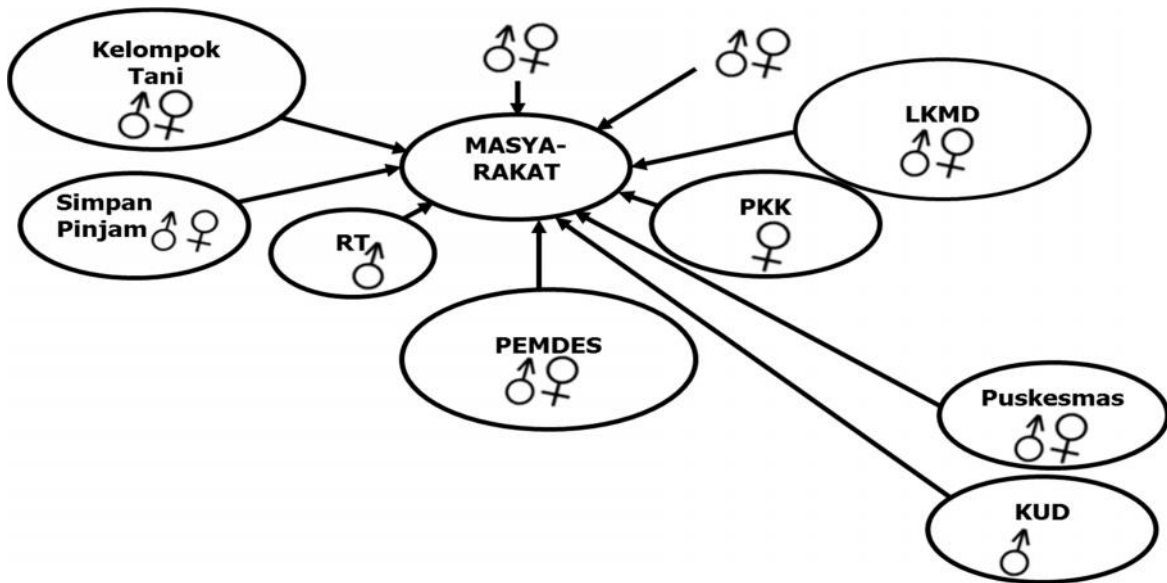
BANJAR DINAS : .....

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

NO	NAMA LEMBAGA	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	PKK	Administrasi PKK tidak tertib	1. SDM pengurus rendah 2. Kesadaran pengurus kurang	-Pengurus PKK -Kader PKK
2.		dst .....		



E. 4. FORMAT DAFTAR GAGASAN BANJAR DINAS

DAFTAR GAGASAN BANJAR DINAS

BANJAR DINAS : .....  
 DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
	CONTOH						
1	Rehabilitasi gedung posyandu	RT 01	1	Unit	14	40	23
2	Pelatihan tata boga	RT 02	15	Orang	5	10	11
3	Pembangunan senderan	RT 01, RT 03	500	Meter	123	256	129

Mengetahui :  
 Perbekel.....

Desa, .....  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Keterangan :  
 A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskkin

F. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH BANJAR DINAS RPJM Desa  
F.1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH BANJAR DINAS

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH BANJAR DINAS RPJM Desa  
BANJAR DINAS .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... , bertempat di Banjar Dinas..... yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Banjar Dinas ..... Musyawarah Banjar Dinas dimaksud untuk menggali gagasan dalam rangka penjarangan masalah, penyebab masalah dan potensi sebagai dasar penyusunan RPJM Desa dengan menggunakan tiga alat kajian meliputi sketsa desa, kalender musim dan diagram kelembagaan yang hasilnya dituangkan dalam Daftar Gagasan Banjar Dinas.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : .....
- b. Notulensi : .....
- c. Nara Sumber
  - 1. .... : .....
  - 2. .... : .....

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Daftar masalah, penyebab masalah dan potensi di wilayah Banjar Dinas sebagaimana format terlampir.
- 2. Daftar gagasan usulan kegiatan Banjar Dinas.
- 3. Daftar nama Delegasi Banjar Dinas sebagai peserta Musyawarah Desa, dan Musrenbangdes RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat  
Tim Penyusun Perencanaan Desa

Notulis

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Perbekel.....

\_\_\_\_\_



## F.2. FORMAT DAFTAR DELEGASI DUSUN

## DAFTAR DELEGASI BANJAR DINAS

BANJAR DINAS: .....

DESA : .....

NO	NAMA	L/P	UNSUR	ALAMAT (RT/RW)
1				
2				
3				
4				
Dst				

Pimpinan Rapat,

\_\_\_\_\_

## G. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Kantor Perbekel ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Desa untuk menyusun RPJM Desa.

Musyawarah Desa untuk membahas :

- a. Pengelompokan masalah
- b. Penyelarasan visi misi
- c. Penyusunan sejarah dan legenda Desa
- d. Pembobotan dan penentuan skala prioritas masalah
- e. Penentuan alternative tindakan pemecahan masalah

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : .....
- b. Notulensi : .....
- c. Nara Sumber  
..... : .....
- ..... : Perbekel.....

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat  
Tim Penyusun RPJM Desa

Notulensi

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Perbekel.....

\_\_\_\_\_

H.KEGIATAN MUSYAWARAH DESA  
H.1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

LEGENDA DAN SEJARAH DESA

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....

NO	TAHUN	PERISTIWA BAIK	PERISTIWA BURUK

Mengetahui :  
Perbekel .....

Desa, .....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

H.2. FORMAT PENGELOMPOKAN MASALAH PENYEBAB DAN POTENSI

PENGELOMPOKAN MASALAH, PENYEBAB DAN POTENSI

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH		
1.	Administrasi Desa tidak tertib	1. SDM rendah 2. Tidak paham	1. Perangkat Desa 2. Anggaran tersedia 3. Kader Pembudayaan Masyarakat
2.	Dst.....		
II	BIDANG PEMBANGUNAN DESA		
1.	Jalan Rt 1 Rusak	1. Pada musim penghujan jalan kemasukan air dari saluran air	1. Tenaga 2. Batu 3. Pasir
	Dst.....		

Mengetahui :  
 Perbekel.....

Desa, .....  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## H.3. FORMAT PENGELOMPOKAN MASALAH SKALA DESA

## PENGELOMPOKAN MASALAH, PENYEBAB DAN POTENSI

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
2	Pelaksanaan Pembangunan		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
4	Pemberdayaan Masyarakat		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		

Mengetahui :  
Perbekel.....

Desa, .....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## H.4. FORMAT PENGELOMPOKAN MASALAH SKALA SUPRA DESA

## PENGELOMPOKAN MASALAH, PENYEBAB DAN POTENSI

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
2	Pelaksanaan Pembangunan		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
4	Pemberdayaan Masyarakat		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		
	.....		

Mengetahui :  
Perbekel.....

Desa, .....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## H.5. FORMAT PRIORITAS MASALAH SKALA DESA

## PRIORITAS MASALAH SKALA DESA

DESA : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : .....

NO	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			Jml Skor	Ran king	Ket
		Tingkat Kerusakan	Dampak	Pengaruh thd Kemiskina n			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
2	Pelaksanaan Pembangunan						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
4	Pemberdayaan Masyarakat						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						

Mengetahui :  
Perbekel.....Desa,  
.....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

H.6. FORMAT PRIORITAS MASALAH SKALA SUPRA DESA

PRIORITAS MASALAH SKALA SUPRA DESA

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

NO	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			Jml Skor	Ran king	Ket
		Tingkat Kerusakan	Dampak	Pengaruh thd Kemiskina n			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
2	Pelaksanaan Pembangunan						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
4	Pemberdayaan Masyarakat						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						

Mengetahui :  
 Perbekel.....  
 \_\_\_\_\_

Desa,  
 .....  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa  
 \_\_\_\_\_

## H.7. FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA

### KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
2	Pelaksanaan Pembangunan				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
4	Pemberdayaan Masyarakat				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				

Mengetahui :  
Perbekel.....

Desa,  
.....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



H.8. FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA SUPRA DESA

KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA SUPRA DESA

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
2	Pelaksanaan Pembangunan				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
4	Pemberdayaan Masyarakat				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				
	.....				

Mengetahui :  
 Perbekel.....

Desa,  
 .....  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

H.9. FORMAT PENENTUAN PRIORITAS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA

PENENTUAN PRIORITAS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....

NO	Tindakan Yang Layak	KRITERIA PENILAIAN			Jml Skor	Ran king	Ket
		Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Duku ngan Poten si			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
2	Pelaksanaan Pembangunan						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
4	Pemberdayaan Masyarakat						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						

Mengetahui : Perbekel.....  
 Desa, .....  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

\_\_\_\_\_

H.10. FORMAT PENENTUAN PRIORITAS ALTERNATIF TINDAKAN  
PEMECAHAN MASALAH SKALA SUPRA DESA

PENENTUAN PRIORITAS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN  
MASALAH SKALA SUPRA DESA

DESA : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN : .....

NO	Tindakan Yang Layak	KRITERIA PENILAIAN			Jml Skor	Ran king	Ket
		Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Duku ngan Potensi			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
2	Pelaksanaan Pembangunan						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
4	Pemberdayaan Masyarakat						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						
	.....						

Mengetahui :  
Perbekel.....

Desa,  
.....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## I.1. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM Desa

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUN .....

SKALA DESA, DESA....., KECAMATAN.....

KABUPATEN JEMBRANA

KODE	BIDANG / PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN						CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020		JUMLAH (Rp.)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10
	CONTOH													
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
1	1	Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
1	1	1	Nama Kegiatan											
1	1	2	Nama Kegiatan											
2	Pelaksanaan Pembangunan													
2	1	Nama Program												
2	1	1	Nama Kegiatan											

DESA, .....

PERBEKEL.....

\_\_\_\_\_

## I.2. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF SUPRA DESA

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUN .....  
 SKALA SUPRA DESA, DESA....., KECAMATAN.....  
 KABUPATEN JEMBRANA

KODE	BIDANG / PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN						CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020		JUMLAH (Rp.)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10
	CONTOH													
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
1	1	Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
1	1	1	Nama Kegiatan											
1	1	2	Nama Kegiatan											
2	Pelaksanaan Pembangunan													
2	1	Nama Program												
2	1	1	Nama Kegiatan											

DESA, .....  
 PERBEKEL.....

\_\_\_\_\_

## I.3. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF KAWASAN PERDESAAN

Matrik Program Kegiatan Indikatif RPJM Desa Tahun .....  
 Kegiatan Kawasan Perdesaan, Desa....., Kecamatan.....  
 Kabupaten Jembrana

KODE	BIDANG / PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN						CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020		JUMLAH (Rp.)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10
	CONTOH													
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
1	1	Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
1	1	1	Nama Kegiatan											
1	1	2	Nama Kegiatan											
2	Pelaksanaan Pembangunan													
2	1	Nama Program												
2	1	1	Nama Kegiatan											

DESA, .....  
 PERBEKEL.....

\_\_\_\_\_

## J. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGGAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA  
PELAKSANAAN PENGGAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa .....  
Kabupaten ..... Provinsi .....  
Desa ..... pada :

Hari dan Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, Klian Banjar Dinas , warga Banjar Dinas, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

## Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
Perbekel.....

Desa .....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## K. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Kantor Perbekel Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Desa untuk menyusun RPJM Desa.

Musyawarah Desa untuk membahas :

- a. Pengelompokan masalah
- b. Penyelarasan visi misi
- c. Penyusunan sejarah dan legenda Desa
- d. Pembobotan dan penentuan skala prioritas masalah
- e. Penentuan alternative tindakan pemecahan masalah

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : .....
- b. Notulensi : .....
- c. Nara Sumber  
..... : .....
- ..... : Perbekel .....

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1.....

2.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat  
Tim Penyusun RPJM Desa

Notulis

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Perbekel .....

\_\_\_\_\_



## L. FORMAT PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

## PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 KABUPATEN : .....  
 PROVINSI : .....

## I. Latar Belakang

Contoh:

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....

## II Tujuan :

Contoh :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f. ....

## III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh :

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

.....

## IV. Pendekatan dan Metode

Contoh :

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

.....

## V. Alat Kaji Dan Instrumen

Contoh :

Alat kajian yang digunakan adalah Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

.....

## VI. Proses Pelaksanaan

Contoh :

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Banjar Dinas untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Banjar Dinas untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Banjar Dinas untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari Banjar Dinas dan/atau kelompok masyarakat.
- f .....

## VII. Hasil

Contoh :

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan.
- 2 Data rencana pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa.
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari Banjar Dinas dan/atau kelompok masyarakat.
- 5 .....

## VIII Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh :

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui :  
Perbekel.....

Desa .....  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

---



---

M. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM Desa

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten.....Provinsi..... dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, pada hari ini :

Hari dan  
Tanggal .....  
Jam .....  
Tempat .....

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : ..... dari .....  
Notulen : ..... dari .....  
Narasumber : 1..... dari .....  
2..... dari .....

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui  
Perbekel.....

Desa, .....  
Ketua BPD.....

\_\_\_\_\_  
Wakil Masyarakat  
\_\_\_\_\_

## N. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA.

BERITA ACARA  
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM Desa

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah RPJM Desa di  
Desa.....

Kecamatan.....Kabupaten.....

Provinsi..... dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa,  
pada:

Hari dan Tanggal : .....

Jam : .....

Tempat : .....

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun  
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan  
RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1 .....

2 .....

3 .....

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh  
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa .....

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Mengetahui :  
Perbekel .....

## O. FORMAT BERITA ACARA MUSRENBANG RPJM DESA

BERITA ACARA  
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RPJM DESA

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
bertempat di Kantor Perbekel ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....,  
dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka  
pelaksanaan Musrenbangdes RPJM Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah  
Desa.

Musrenbangdes RPJM Desa untuk membahas :

1. Visi misi Desa
2. Daftar rencana prioritas pembangunan skala Desa
3. Prioritas Daftar Usulan pembangunan Desa
4. Rancangan Perdes RPJM Desa

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan rapat : .....
- b. Notulis : .....
- c. Nara Sumber
  - 1. .... : .....
  - 2..... :.....

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Notulis/ Sekretaris

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mengetahui,  
Perbekel.....

\_\_\_\_\_

**MENGETAHUI DAN MENYETUJUI,  
WAKIL DARI PESERTA MUSRENBANG DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

## P. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA



PERBEKEL .....

KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DESA .....

NOMOR : ..... TAHUN .....

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL .....,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .....Tahun .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30); Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 );
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 );
16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 692).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

dan

PERBEKEL.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA .....TAHUN .....



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa .....(nama desa)
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah .....(nama desa)
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
19. Visi Perbekel adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
20. Misi Perbekel adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA  
Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ..... Tahun .....-.....  
disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Landasan Hukum
  - C. Tujuan dan Manfaat
- b. BAB II PROFIL DESA
  - A. Legenda dan Sejarah Desa
  - B. Kondisi Umum Desa
  - C. SOTK Desa
- c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
  - A. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
  - B. Musyawarah Banjar Dinas
  - C. Musyawarah Desa
  - D. Musrenbang RPJM Desa
- d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
  - A. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
  - B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
  - C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- e. BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
  - A. Visi
  - B. Misi
  - C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
  - D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
  - E. Program dan Kegiatan Indikatif
- f. BAB V. PENUTUP
- g. LAMPIRAN-LAMPIRAN
  - 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
  - 2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
  - 3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
  - 4. Pengkajian Keadaan Desa ( Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
  - 5. Berita Acara Musyawarah ( Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Musyawarah, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
  - 6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah ( Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Musyawarah, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
  - 7. Notulen Musyawarah ( Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Musyawarah, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
  - 8. Peta Desa
  - 9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Musyawarah, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)

#### Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

RPJM Desa Tahun .....merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam Pelaksanaan pembangunan Desa.

#### Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun APBDesa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa .....  
pada tanggal .....  
PERBEKEL.... (Nama Desa)

tanda tangan

(Nama).....

Diundangkan di Desa .....  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DESA .....(Nama Desa).....

tanda tangan

Nama.....

LEMBARAN DESA .....(Nama Desa).. TAHUN..... NOMOR .....

## Q. FORMAT NASKAH RPJM DESA

LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA .....  
 NOMOR : ... TAHUN .....  
 TENTANG  
 .....

## NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM -DESA)

TAHUN .....

DESA ..... KECAMATAN.....

KABUPATEN JEMBRANA

## DAFTAR ISI

## BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang / ndahuluan
- b. Landasan Hukum
- c. Tujuan
- d. Kesesuaian Dengan Dokumen Perencanaan Daerah
- e. Sistematika

## BAB II PROFIL DESA

- a. Sejarah Desa
- b. Gambaran Umum Desa
- c. SOTK Desa
- d. Masalah / isu strategis yang dihadapi Desa

## BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

- a. Kajian Desa Partisipatif
- b. Musyawarah Desa RPJM-Desa
- c. Musrenbang RPJMDes

BAB IV : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH  
 KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN  
 INDIKATIF

- a. Visi
- b. Misi
- c. Arah Kebijakan Pembangunan
- d. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- e. Program dan Kegiatan Indikatif

## BAB V : INDIKATOR KINERJA

## BAB VI : PENUTUP

## LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
4. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
5. Pengkajian Keadaan Desa ( Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
6. Berita Acara Musyawarah ( Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Musyawarah, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
7. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah ( Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Musyawarah, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
8. Notulen Musyawarah ( Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Musyawarah, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
9. Peta Desa
10. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Musyawarah, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)

Contoh :

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa ..... untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan

pembangunan di Tingkat Daerah, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

#### B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015;

#### C. TUJUAN DAN MANFAAT.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa ..... ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :
  - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Daerah, Kecamatan maupun Desa.
  - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa .....
  - c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa .....
2. Manfaat RPJM Desa :
  - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.

- b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
- c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

#### D. HUBUNGAN RPJM Desa dan DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jembrana Tahun..... RPJM-Desa Desa .... Kecamatan ..... Tahun ..... mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun .....
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun...RPJM-Desa Desa ..... Kecamatan ..... Tahun ..... mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jembrana Tahun .....

#### E. SISTEMATIKA RPJM Desa

Rencana Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Desa ..... Kecamatan.....Tahun.....disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang / Pendahuluan, Landasan Hukum, Tujuan, Hubungan Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika

##### BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

Berisi Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, SOTK Desa, Masalah/ isu strategis yang dihadapi Desa

##### BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Berisi kajian Desa Partisipatif, Musyawarah Desa, Musrenbang RPJM Desa

##### BAB IV: VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Berisi visi misi Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program dan Kegiatan Indikati

##### BAB V: INDIKATOR KINERJA

##### BAB VI: PENUTUP

##### LAMPIRAN



## BAB II GAMBARAN UMUM DESA

### A. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

#### 1. LEGENDA DESA (contoh)

Uraian tentang legenda desa.....

#### 2. SEJARAH DESA (CONTOH)

Uraian tentang sejarah desa.....

#### 3. KONDISI UMUM DESA

##### a. Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa ..... merupakan salah satu dari .... Desa di Kabupaten ....., dan memiliki luas Wilayah ..... Km. Secara topopografis terletak pada ketinggian ..... meter ..... meter diatas permukaan air laut.

Posisi Desa ..... yang terletak pada bagian .... Kabupaten ..... berbatasan langsung dengan, sebelah barat Desa ....., dan Desa ....., sebelah timur berbatasan Desa ....., sebelah Utara Desa ....., serta sebelah selatan Desa.....

Lahan di Desa sebagian besar merupakan Tanah Kering ..... % dan Tanah sawah sebesar ..... %.

Tabel 1

PERUNTUKAN LAHAN

NO	TANAH SAWAH	LUAS	TANAH KERING	LUAS
1.	Irigasi Teknis		1. Bangunan	
2	Irigasi setengah Teknis		2. Tegalan/Kebun	
3	Irigasi sederhana No PU		3. Penggembalaan	
4	Tadah hujan		4. Tambak	
			5. Kolam	
			6.Tidak diusahakan	
			7. Tanamam Kayu	
			8. Hutan Negara	
			9. Tanah Lain	

Sumber data ..... Profil Desa Th .....

## b. Demografi

Jumlah Penduduk Desa ..... berdasarkan Profil Desa tahun ..... sebesar ..... jiwa yang terdiri dari .....laki laki dan ..... perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun ..... sampai dengan tahun ..... adalah sebagai berikut :

Tabel 2

## PERTUMBUHAN PENDUDUK

NO	JENIS KELAMIN	2012	2013	2014	%
1	Laki laki				
2	Perempuan				
3	Jumlah				

Sumber data ..... Profil Desa Th .....

Sebagian besar penduduk Desa ..... bekerja pada sektor ..... disusul sektor industri secara detail mata pencaharian penduduk Desa ..... adalah sebagai berikut :

Tabel 3

## MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

NO	MATA PENCAHARIAN	2012		2013		2014	
		L	P	L	P	L	P
1	Pertanian						
2	Perdagangan						
3	Industri						
4	Jasa						
5	PNS						

Sumber Data Profil Desa Th .....

Kemudian kalau kita lihat Trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan.

Tabel 4

## PERTUMBUHAN ANGKATAN KERJA

NO	KLASIFIKASI	2012		2013		2014		%
		L	P	L	P	L	P	
1	Usia Kerja							
2	Angkatan Kerja							
3	Mencari Kerja							

Sumber Data Profil Desa Th .....

### c. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Di Desa ..... masih terdapat ..... % perempuan yang belum tamat SD dan .....% laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan sedangkan yang menamatkan Akademi dan Perguruan Tinggi baru .....% untuk wanita dan ..... % untuk laki laki .

Tabel 5  
TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	Tidak tamat SD		
2	Tamat SD		
3	Tamat SLTP		
4	Tamat SLTA		
5	Tamat Akademi/PT		

Sumber Data Profil Desa Th.....

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa ..... justru hanya lulusan ....., dan disusul dengan .....

Tabel 6  
INDIKATOR AKSES PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1	APK						
2	Angka Putus Sekolah						
3	Angka Melanjutkan						

Sumber Data Profil Desa Th.....

### d. Kesehatan

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa .....

Tabel 7  
INDIKATOR KESEHATAN

NO	URAIAN	2012	2013	2014
1	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan			
2	Angka Kematian Bayi ( IMR )			
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan ( MMR )			
4	Cakupan Imunisasi			
5	Balita Gisi Buruk			

Sumber Data Profil Desa Thn .....

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami ....., tetapi angka kematian bayi terus ....., angka kematian ibu melahirkan terus mengalami .....

e. Insfrasturktur Dasar Dan Pemukiman

Tabel 8

KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN
		BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	4
1	Jalan Desa			
2	Aspal			
3	Makadam			
4	Tanah			
5	Jalan Antar Desa			
6	Aspal			
7	Makadam			
8	Tanah			

Sumber Data Profil Desa Thn .....

Tabel 9

KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Saluran Primer			
2	Saluran Skunder			
3	Saluran Tersier			

Sumber Data Profil Desa Thn .....

Tabel 10

KONDISI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

NO	URAIAN	2013	2013	2014
1	Rumah Tidak Sehat			
2	Rumah Tidak Layak Huni			

Sumber Data Profil Desa Thn .....

## f. Kemiskinan

Menurut sumber Data dari BPS tahun .... jumlah KK Miskin di Desa ..... adalah mencapai ..... % yang tersebar di ..... Banjar Dinas. Banjar Dinas yang tingkat prosentase kemiskinanya paling rendah yaitu Banjar Dinas....dengan prosentase ..... % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Banjar Dinas .....dengan prosentase ..... %.

Tabel 11

## SEBARAN KEMISKINAN

NO	BANJAR DINAS/RT	PROSENTASE KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1			
2			
3			
4			

Sumber: Data BPS Tahun .....

## g. Ekonomi

## g.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa ..... cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun ..... ke tahun ....., %.

Tabel 12

## PERTUMBUHAN EKONOMI

NO	TAHUN	PDRB ( JUTA RP)		LAJU PERTUMBUHAN
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN	
1.	2.	3.	4.	5.
1	2012			
2	2013			
3	2014			

Sumber Data Profil Desa Thn .....

## g.2. Potensi Ekonomi

Tabel 13  
POTENSI HASIL PERTANIAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2012	2013	2014
1.	2.	3.	4.	5.
I	Tanaman Pangan			
1	Padi			
2	Jagung			
3	Ubi Kayu			
4	Ubi Jalar			
II	Buah Buahan			
1	Jeruk			
2	Mangga			
3	Pepaya.			
III	Perkebunan			
1	Kelapa			
2	Karet			

Sumber Data Profil Desa Thn .....

Tabel 14  
POTENSI PETERNAKAN DAN ERIKANAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2012	2013	2014
I	Peternakan			
1.	Sapi	Ekor	Ekor	Ekor
2	Kerbau	Ekor	Ekor	Ekor
3	Kambing	Ekor	Ekor	Ekor
4	Ayam			
ii	Perikanan			
1	Keramba	.....Ton/thn	..Ton/thn	.....Ton/thn
2	Tambak	.....Ton/thn	..Ton/thn	.....Ton/thn
3	Empang	.....Ton/thn	..Ton/thn	.....Ton/thn

Sumber Data Profil Desa Thn .....

## 3. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN SOTK DESA

## a. Lembaga Kemasyarakatan Desa

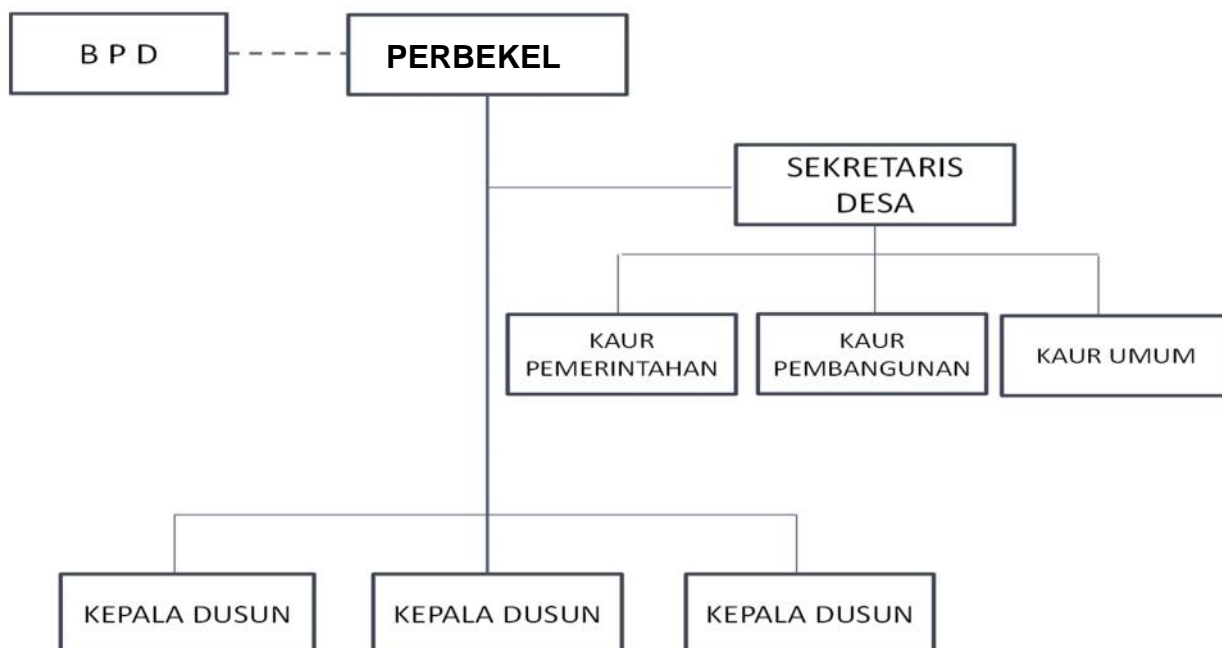
Tabel 15

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LPM			
2	PKK			
3	Karang Taruna			
4	Sekaa....			
5	RT			
6	Gapoktan			

Sumber Data Profil Desa Thn .....

## b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



### 3. MASALAH YANG DIHADAPI DI DESA

Berdasarkan hasil musyawarah Banjar Dinas diperoleh gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Desa.....kecamatan.....kabupaten.....Sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 16  
DATA MASALAH DAN PENYEBAB YANG DIHADAPI DI DESA.....

NO.	MASALAH	PENYEBAB
1.	Bidang.....	

## BAB III

### PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa ..... Kecamatan..... Kabupaten.....adalah sebagai berikut :

#### 1. KAJIAN DESA PARTISIPATIF

##### a. Musyawarah Banjar Dinas

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa ..... dengan menggunakan Alat Kajian :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah Banjar Dinas yang telah dilakukan pada :

NO	BANJAR DINAS	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Bd.....	.....	Rumah Bp. ....
2	Bd.....	.....	Rumah Bp. ....

dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Banjar Dinas, kemudian dituangkan dalam format Daftar Masalah, Penyebab dan Potensi dan Daftar Gagasan Banjar Dinas.....



## b. Musyawarah Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam Musyawarah ditingkat Desa yang dilaksanakan pada ..... dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Banjar Dinas
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat skala prioritas  
Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.
5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.  
Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.
6. Menetapkan tindakan yang layak  
Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan skala Desa.

## 2. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA

Musyawarah Desa Penyusunan RPJM-Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM- Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Musyawarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari..... Tanggal .....bulan .....tahun.....

### 3. MUSRENBANG RPJM-DESA

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Penyusunan RPJM DEsa selanjutnya dilaksanakan Musrenbangdes penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari....., tanggal ....., bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM Desa Tahun .....

#### BAB IV

#### VISI , MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

##### 1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Visi Desa ..... adalah :

“Terwujudnya Tata Pemerintahan Desa Yang Baik dan Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat” (contoh)

##### 2. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa ..... adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat.
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar.

##### 3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa ..... Kecamatan ..... Desa ..... selama periode Tahun .....

Misi pertama : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.

3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;

Misi kedua : Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak Dasar Rakyat.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;
3. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;

Misi ketiga : Pembangunan Infrastruktur Dasar.

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan.
2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar

4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

Prediksi Pendapatan Desa Desa ..... Kecamatan.....Desa ..... Tahun .....

Sumber Pendapatan	Tahun...	Tahun.	Tahun..	Tahun...	Tahun...
Bantuan keuangan	25.000.	26.000	27.000.00	28.000.00	29.000.000
Hibah	2.000.0	2.500	3.000.00	3.500.00	4.000.000
Sumbangah Pihak Ke Tiga					

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa :

Kebijakan Keuangan Desa tahun ..... yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa ..... Sesuai urusannya diarahkan melalui

upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa :

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif  
Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakan olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

PREDIKSI ALOKASI INDIKATIF BELANJA DESA  
 DESA ..... KECAMATAN.....DESA  
 ..... TAHUN.....

URAIAN BELANJA	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Desa						
Belanja Langsung						
1. Belanja Bidang Penyenggaraan Pemerintahan						
2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan						
3. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat						
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat						
Belanja Tidak Langsung						
1. Belanja Pegawai						
2. Belanja Subsidi						
3. Belanja Hibah						
4. Belanja Bantuan Sosial						
5. Belanja Bantuan Keuangan						
6. Belanja tak terduga						

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman

pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

#### 5. PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RPJM Desa TAHUN .....  
SEBAGAI BERIKUT :

KODE	BIDANG	VOLUME	LOKASI
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
1.1	.....		
1.1.1	.....		
1.1.2	.....		
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
2.1	.....		
2.1.1	.....		
2.1.2			
3.	PEMBINAAN MASYARAKAT		
3.1	.....		
3.1.1	.....		
3.1.2	.....		
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.1	.....		
4.1.1	.....		
4.1.2	.....		

### BAB V

#### INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada tahun ..... meliputi hal-hal sebagai berikut :

Matrik Indikator Kinerja  
RPJM DESA ..... KECAMATAN .....

BIDANG/ INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN .....	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bidang.....							
1							
2							
3							

Bidang.....								
I								
1.								
2.								
II.								
1.								

## BAB VI PENUTUP

Demikian RPJMDes Desa ..... ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa ..... Kecamatan ..... Tahun .....-..... yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

PERBEKEL .....

.....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TANGGAL .....

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUN .....SKALA DESA

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN JEMBRANA

KODE	BIDANG / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN						CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020		JUMLAH (Rp.)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10
	CONTOH													
1	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>													
1	1	Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
1	1	1	Nama Kegiatan											
1	1	2	Nama Kegiatan											
2	<b>Pelaksanaan Pembangunan</b>													
2	1	Nama Program												
2	1	1	Nama Kegiatan											

DESA, .....

PERBEKEL.....

\_\_\_\_\_



LAMPIRAN : PERATURAN DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TANGGAL .....

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUN .....SKALA SUPRA DESA  
 DESA.....KECAMATAN.....  
 KABUPATEN JEMBRANA

KODE	BIDANG / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN						CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020		JUMLAH (Rp.)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10
	CONTOH													
1	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>													
1	1	Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
1	1	1	Nama Kegiatan											
1	1	2	Nama Kegiatan											
2	<b>Pelaksanaan Pembangunan</b>													
2	1	Nama Program												
2	1	1	Nama Kegiatan											

DESA, .....  
 PERBEKEL.....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TANGGAL .....

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUN .....KAWASAN PERDESAAN  
 DESA.....KECAMATAN.....  
 KABUPATEN JEMBRANA

KODE	BIDANG / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN						CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020		JUMLAH (Rp.)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10
	CONTOH													
1	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>													
1	1	Penetapan dan Penegasan Batas Desa												
1	1	1	Nama Kegiatan											
1	1	2	Nama Kegiatan											
2	<b>Pelaksanaan Pembangunan</b>													
2	1	Nama Program												
2	1	1	Nama Kegiatan											

DESA, .....  
 PERBEKEL.....

